

CENDEKIAWAN & POLITIK PROGRAMATIK



Asep Sahid Gatara

Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Bandung; Wakil Ketua ICMI Jawa Barat

Email: asepsahidgatara@uinsgd.ac.id C.P: 085315550365

Hari Kamis ini, 6 Desember 2018, segenap cendekiawan Muslim yang berhimpun dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) kembali akan berkumpul dan berembung dalam pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silaknas) sekaligus Milad ICMI ke-28.

Kali ini Silaknas diselenggarakan di Provinsi Lampung, dengan pusat kegiatan di Universitas Bandar Lampung (UBL). Kegiatan ini direncanakan akan dihelat sampai hari Sabtu, 8 Desember 2018 mendatang.

Di antara tujuan dari agenda rutin tahunan ICMI tersebut adalah konsolidasi organisasi, silaturahmi para pengabdian ICMI dan aktualisasi peduli NKRI. Ada agenda menarik sekaligus menggelitik yang patut ditunggu dan diperhatikan bersama.

Yakni, kehadiran kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden di pertemuan nasional para cendekiawan Muslim tersebut, yang keduanya memang diundang langsung Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie.

Mengelitik karena hal itu menjadi pertarungan besar bagi independensi politik kecendekiawanan ICMI. Apakah secara kelembagaan ICMI akan menjadi bagian dari salah satu barisan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir nanti? Ataukah berada di luar keduanya?

Dan, atukah malah lahir formulasi baru dalam mendefinisikan dan memposisikan ICMI di tengah kontestasi Pemilu 2019, khususnya pilpres, yang semakin semarak dan berserak? Tentu jawaban globalnya dapat segera diperoleh hari ini dan dua hari ke depan.

Politik Cendekiawan

Namun demikian, dari sisi ideal, ICMI sebagai organisasi masyarakat yang berhimpun di dalamnya para cendekiawan Muslim dengan berbagai latar sosial dan politik, sejatinya berada pada garda terdepan dalam mengedepankan pemikirannya atau suara intelektual dan moral.

Silaknas ini semestinya menjadi momentum ICMI merumuskan kembali bagaimana para cendekiawan Muslim bisa berkiprah lebih jauh. Apa fokus cendekiawan dalam berbangsa dan bernegara, dengan cara apa, untuk siapa, dan berdampak apa?

Silaknas sekarang ini, misalnya, harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh, tidak hanya sebagai rutinitas tahunan yang penuh basa-basi dan seremoni belaka. Silaknas diarahkan untuk menggali dan merumuskan jawaban-jawaban atas segala persoalan bangsa.

Dengan demikian, tercipta ketersambungan antara persoalan dan jawaban. Ingat, bersambungannya antara persoalan dan jawaban merupakan salah satu kunci pokok bagi lahirnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermutu.

Salah satu persoalan bangsa yang tidak boleh luput dari Silaknas ICMI ini adalah, sebagaimana dikatakan Yudi Latif (2018), perkembangan politik di Indonesia yang semakin tidak bermutu. Misalnya, persoalan pada masa kampanye Pilpres 2019 ini.

Aktivitas kampanye kedua belah pihak pasangan kandidat presiden dan wakil presiden lebih banyak berputar pada sejumlah peragaan adu sindiran melalui sejumlah kata-kata dibanding mempromosikan atau memperkenalkan visi, misi, gagasan, dan program kerja sebagai kunci jawaban atas persoalan kebangsaan.

Sayangnya lagi, sindiran kata-kata yang diperagakannya itu cenderung dangkal dan tidak berharga atau remeh temeh. Sebut saja kata buta-budek, tampang Boyolali, politik sontoloyo, ekonomi kebodohan, politik genderuwo, tabok, dan sebagainya.

Kata-kata itu sama sekali tidak merujuk objek atau realitas permasalahan dan kebutuhan yang sebenarnya ada pada rakyat akar rumput. Lebih dari itu, kata-kata yang digunakannya pun malah banyak bermuatan umpatan, makian, gurauan, dan kejengkelan.

Semua kata serta muatannya itu tentu tidak dapat melayani kepentingan rakyat. Hal yang diperlukan adalah tawaran gagasan besar mengenai perubahan dan perbaikan Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Tawaran-tawaran gagasan yang disajikan melalui kontestasi atau festival terbuka serta penuh gembira. Dengan demikian, semua lapisan rakyat mendapatkan ragam pilihan dengan berlandaskan pengetahuan yang layak.

Deretan permasalahan Pilpres di atas, sekali lagi, sejatinya menjadi salah satu sorotan pada Silaknas kali ini. ICMI misalnya lagi bisa menjadi corong besar penyuaranya mengenai pentingnya politik programatik.

Ini selaras dengan hasil survei sejumlah lembaga survei yang merilis, lebih dari 80 persen responden calon pemilih, baik calon pemilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin maupun pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, tidak tahu visi, misi dan program kerja mereka.

Politik programatik merupakan bagian dari strategi elektoral. Dalam strategi elektoral dikenal juga dengan politik non programatik, yaitu ekspresi politik seperti adu kata-kata yang remeh temeh, jual beli suara, penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, dan memainkan sentimen SARA.

Sedangkan strategi elektoral politik programatik ialah politik yang mendorong kandidat memilih strategi menggerakkan dukungan dengan mengandalkan pada kebijakan atau program tertentu yang dapat menyelesaikan problem bersama (Aldrich, 1995 dalam Mada Sukmajati, 2018).

Politik programatik juga menekankan, program kandidat tersebut sejatinya diturunkan dari ideologi dan program dari partai politik pengusung (dan pendukung). Dari titik inilah kandidat presiden dan wakil presiden sering dikatakan sebagai “petugas partai”.

Politik programatik mendorong kandidat berorientasi tidak hanya pada isu-isu nasional dan internasional, namun juga berorientasi pada isu-isu lokal, seperti lingkungan, tata kelola pemerintahan bawah, pemberdayaan rakyat dan sebagainya.

Karena itu, politik programatik juga mengajak rakyat akar rumput untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Ini menunjukkan, politik programatik menekankan sinergi antara *down to up* dan *top to down*.

Jadi, politik itu juga dapat dipahami sebagai panggung alokasi serta pendistribusian sumber daya yang adil bagi seluruh lapisan rakyat.

Untuk itu, ICMI harus terus mendorong, sudah waktunya, melalui masa kampanye ini, semua lapisan rakyat mendapatkan pelayanan politik terbaik, khususnya pelayanan informasi tawaran-tawaran program kerja pasangan kandidat.

Tentu tidak dengan *gimmick* kebencian, kebohongan, makian, fitnah, dan hal remeh-temeh lainnya, melainkan dengan alunan kebajikan dan keadaban bagi semua. *Wallahu'alam bi shawab.*